



RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat Menyusun RENCANA KERJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini bisa dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Namun demikian jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran, yang berujung pada penurunan jumlah program atau kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan/pengurangan program atau kegiatan yang memiliki bobot yang lebih rendah.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing daam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kuala Tungkal,

2022

**Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAFRUN ST
Pembina

NIP. 19821126 201001 1 015

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| Latar Belakang | 1 |
| Landasan hukum | 3 |
| Maksud dan Tujuan | 5 |
| Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN | |
| Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021..... | 8 |
| Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun Anggaran 2023)..... | 11 |
| Analisis Kinerja Pelayanan SKP..... | 19 |
| Isu-isu..... | 20 |
| Review Terhadap Rancangan RKPD..... | 29 |
| Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 30 |
| BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 31 |
| Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat..... | 31 |
| Program dan Kegiatan | 34 |
| BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... | 52 |
| BAB V: PENUTUP | 53 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERAKIM) KabupatenTanjung Jabung Barat adalah satu-satunya

Unit Organisasi yang bertanggung jawab di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kinerja perlu disusun Rencana Kinerja (Renja) organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan setiap aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih mampu meningkatkan kinerjanya. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD KabupatenTanjung Barat Tahun 2016-2021 dan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjab Barat kedepan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat., maka Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses Pembangunan Daerah Di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan

komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 12. Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 60);
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah dengan dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan menjadi pedoman dan arah kebijakan yaitu :

- ❖ Memberikan gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .
- ❖ Sebagai acuan bagi aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
- ❖ Sebagai titik dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk :

- ❖ Merencanakan dan melakukan perubahan strategis.
- ❖ Memelihara, mengelola dan memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai.
- ❖ Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebaga wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- ❖ Memberikan pedoman, alat pengenaladi Kinerja dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.

- ❖ Sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan di Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama satu tahun kedepan.
- ❖ Perumusan tujuan dan sasaran Dinas PERAKIM tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas PERAKIM Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2020 DAN PREDIKSI TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020
- 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun + Berjalan (Tahun 2023)
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Akhir RKP
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA

BAB V PENUTUP

**BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
PREDIKSI TAHUN BERJALAN**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ditinjau dari Pelaksanaan Kegiatan
sampai dengan September Tahun 2022**

| No | Unit Kerja>Nama Program/Uraian Kegiatan | Jumlah Total Rp. | Jumlah DPA | | Fisik |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| | | | Realisasi Keuangan | | |
| | | | Rp | % | |
| | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7.712.995.317 | 4.702.741.829 | 60,97 | 66 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.750.000 | 10.225.000 | 41,31 | 42,42 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.650.000 | 21.705.000 | 88,05 | 83,46 |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.849.616.115 | 2.209.543.847 | 77,54 | 82,82 |
| 4 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 341.160.000 | 242.660.000 | 71,13 | 66,10 |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya | 33.800.000 | 32.800.000 | 97,04 | 100 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 75.000.000 | 35.000.000 | 46,67 | 45 |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.866.115 | 4.487.848 | 92,23 | 80 |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 84.134.302 | 77.403.271 | 92 | 90 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | 26.250.000 | 16.745.000 | 63,79 | 70 |
| 10 | Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan | 29.999.736 | 25.759.596 | 85,87 | 80 |
| 11 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12.000.000 | 5.250.000 | 43,75 | 56,25 |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 899.848.100 | 365.422.398 | 40,61 | 64,59 |
| 13 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.927.118.710 | 706.760.000 | 36,67 | 34,07 |
| 14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | 267.913.168 | 183.991.000 | 68,68 | 68,07 |
| 15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000 | 4.500.000 | 75 | 80 |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 123.000.000 | 70.952.755 | 57,69 | 60,92 |
| 17 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 565.563.764 | 500.813.764 | 88,55 | 87,02 |
| 18 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 79.315.000 | 36.852.600 | 46,46 | 48,82 |
| 19 | Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 163.200.307 | 67.307.050 | 41,24 | 49,97 |
| 20 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 36.190.000 | 23.425.000 | 64,73 | 53,93 |
| 21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 138.620.000 | 61.137.700 | 44,1 | 44,14 |
| | Program Pengembangan Perumahan | 772.460.000 | 416.429.000 | 53,91 | 30 |
| 1 | Identifikasi lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | 300.000.000 | 199.467.000 | 66,49 | 66,66 |
| 2 | Sosialisasi tentang Mekanisme penggantian Hak atas tanah dan bangunan | 10.500.000 | 0 | 0 | |
| 3 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme akses perumahan KPR-FLPP | 10.500.000 | 10.410.000 | 99,14 | 97,42 |
| 4 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 148.400.000 | 7.350.000 | 4,95 | 5,46 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 5 | Penyusunan Site Plan dan/atau detail Engineering Design (DED) bagi Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 199.202.000 | 99,6 | 100 |
| 6 | Pengadaan Lahan untuk pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pembangunan Rumah bagi Korban | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan | 34.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Program Kawasan Permukiman | 3.411.370.000 | 1.927.723.791 | 56,51 | 81 |
| 1 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 50.000.000 | 49.940.000 | 99,88 | 100 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 50.000.000 | 49.883.400 | 99,77 | 100 |
| 3 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 1.000.000.000 | 578.431.950 | 57,84 | 58 |
| 4 | Pembentukan/pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 11.370.000 | 11.320.000 | 99,56 | 98,96 |
| 5 | Penyusunan rencana tapak(site plan) dan detail engineering design (DED) Peremajaan/pemugaran Permukiman Kumuh | 1.250.000.000 | 719.119.050 | 57,53 | 58 |
| 6 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 4.615.000.000 | 1.868.436.839 | 40,49 | 40,95 |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | 65.483.624.000 | 9.826.015.513 | 15,01 | 11 |
| 1 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 2.435.000.000 | 120.985.660 | 4,97 | 5,257 |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang fungsi hunian | 62.959.524.000 | 9.695.079.853 | 15,4 | 15,12 |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | 89.100.000 | 9.950.000 | 11,17 | 11,72 |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------|------|
| | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 80.955.949.317 | 18.222.317.581 | 22,51 | 36,6 |

Review atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 diatas adalah pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Tahun 2023. Adapun persentase realisasi secara keseluruhan adalah sebesar 93,88%.

2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun Anggaran 2023)

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | RENCANA TAHUN 2023 | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | LOKASI | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12 Bulan | 79.955.949.317 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B | | 100% | 49.400.000 | APDB |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------------|-------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 12 Dokumen | 24.750.000 | APDB |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 7 Laporan | 24.650.000 | APDB |
| Administrasi keuangan perangkat daerah | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD | | 100% | 3.190.776.115 | APDB |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 25 Orang/Bulan | 2.849.616.115 | APDB |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 25 Dokumen | 341.160.000 | APDB |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Perkim | 100% | 108.800.000 | APDB |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 160 Paket | 33.800.000 | APDB |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 16 Orang | 75.000.000 | APDB |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran | Dinas Perkim | 100% | 1.057.098.253 | APDB |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 4.866.115 | APDB |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 84.134.302 | APDB |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---|----------------------|-------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 26.250.000 | APDB |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | | 12 paket | 29.999.736 | APDB |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 12 Dokumen | 12.000.000 | APDB |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 360 Laporan | 899.848.100 | APDB |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | Dinas Perkim | 100% | 2.195.031.878 | APBD |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 3 unit filling cabinet, 4 buah lemari arsip, 6 buah meja meubeleur, 1 biro, 6 kursi pejabat, 50 kursi rapat (69 Unit) | 267.913.168 | APBD |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | 2 unit Motor | 1.927.118.710 | APBD |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | Dinas Perkim | 100% | 694.563.764 | APBD |
| Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 500 Laporan | 6.000.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 123.000.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 Laporan | 565.563.764 | APBD |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara | Dinas Perkim | 100% | 417.325.307 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 9 Unit | 79.315.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 3 Unit | 163.200.307 | APBD |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 60 Unit | 36.190.000 | APBD |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 1 Unit | 138.620.000 | APBD |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana | Dinas Perkim | 100% | 5.110.000.000 | APBD |
| | persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah | Dinas Perkim | 100% | | |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dinas Perkim | 100% | 300.000.000 | APBD |
| | | | | | |
| Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 300.000.000 | APBD |
| | | | | | |
| Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase KK yang mengikuti sosialisasi | Dinas Perkim | 100 | 21.000.000 | APBD |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|--------------------|-------------|
| Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | 13 Kecamatan | 50 Orang | 10.500.000 | APBD |
| Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | 13 Kecamatan | 50 Orang | 10.500.000 | APBD |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Tersedianya Rumah Layak Huni bagi korban Bencana atau relokasi program kabupaten | Dinas Perkim | 20 Unit | 406.800.000 | APBD |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 13 Kecamatan | 10 Unit | 148.400.000 | APBD |
| Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 13 Kecamatan | 3 Dokumen | 200.000.000 | APBD |
| Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota | 13 Kecamatan | 10 Ha | 50.000.000 | APBD |
| Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 13 Kecamatan | 10 Unit Rumah | 8.400.000 | APBD |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase developer yang memperoleh izin | Dinas Perkim | 100% | 44.660.000 | APBD |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 13 kecamatan | 2 Dokumen | 10.500.000 | APBD |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 13 Kecamatan | 6 Laporan | 34.160.000 | APBD |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh | Dinas Perkim | 10% | 53.560.000.000 | APBD |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Persentase pengendalian pengembangan kawasan permukiman | Dinas Perkim | 100% | 100.000.000 | APBD |
| Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi | 13 Kecamatan | 1 Dokumen | 50.000.000 | APBD |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 13 Kecamatan | 3 Laporan | 50.000.000 | APBD |
| Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha | Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh | Dinas Perkim | 100% | 1.011.370.000 | |
| Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 13 Kecamatan | 3 Dokumen | 1.000.000.000 | APBD |
| Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 13 Kecamatan | 6 Laporan | 11.370.000 | APBD |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh | Dinas Perkim | 100 | 5.865.000.000 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------------|------|
| Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 1.250.000.000 | APBD |
| Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | 13 Kecamatan | 1 Ha | 4.615.000.000 | APBD |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan | Dinas Perkim | 100% | 64.483.624.000 | |
| Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 2.435.000.000 | |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 13 Kecamatan | 13 Lokasi | 61.959.524.000 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 13 Kecamatan | 1 laporan | 89.100.000 | APBD |
| Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | Jumlah registrasi dan Sertifikasi yang diterbitkan sesuai Peraturan/Ketentuan | Dinas Perkim | 2 Dokumen | 10.500.000 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 13 kecamatan | 2 Laporan | 10.500.000 | APBD |
| | | | | | |
| | | | | 178.484.600.000 | |

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari tabel T-C.30

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

| 1 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | 2 Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) | 3 Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | 4 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
|--|--|--|---|---|---------------------------|----------------------------|---|--|---|
| | | | | 5 Target Tahun 2022 | 6 Realisasi Tahun 2022 | 7 Tingkat Realisasi (%) | | 8 Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) | 9 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2 NILAI SAKIP OPD | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/5) | 8 9=(4+6+8) | 10(9/8) | |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B | 100% | 17% | 100% | 79% | 79% | Nilai B | 65% | |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 72 Dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 10 Dokumen | 83% | 34 dokumen | 47% | |
| Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 42 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 5 laporan | 71% | 21 dokumen | 50% | |
| Administrasi keuangan perangkat daerah | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD | 100% | 14% | 100% | 100% | 100% | 71% | 71% | |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 180 orang/bulan | 25 orang/bulan | 25 orang/bulan | 25 orang/bulan | 100% | 75 orang/bulan | 42% | |
| Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 180 Dokumen | 25 dokumen | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100% | 75 Dokumen | 42% | |

| Administrasi kepegawalan perangkat daerah | Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 100% | 6% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 65% | 65% |
|--|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-----|
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1017 Paket | 57 Paket | 160 Paket | 150 Paket | 160 Paket | 160 stel | 537 Paket | 160 stel | 53% | |
| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 91 Orang | 12 Orang | 15 Orang | 7 Orang | 15 Orang | 16 orang | 35 orang | 16 orang | 38% | |
| Administrasi umum perangkat daerah | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran | 100% | 20% | 100% | 97% | 100% | 100% | 72% | 100% | 72% | |
| penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 72 paket | 12 Paket | 12 paket | 10 paket | 12 paket | 12 paket | 34 paket | 12 paket | 47% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/5) | 8 | 9=(4+6+8) | 10(9/3) |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 72 paket | 12 Paket | 12 paket | 10 paket | 83% | 40 paket | 62 paket | 86% |
| Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 72 paket | 12 Paket | 12 paket | 10 paket | 83% | 12 paket | 34 paket | 47% |
| Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 72 paket | 12 Paket | 12 paket | 10 paket | 83% | 12 paket | 46 paket | 64% |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 72 Dokumen | 12 dokumen | 12 Dokumen | 10 Dokumen | 83% | 12 Dokumen | 34 paket | 47% |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2160 Laporan | 360 Laporan | 360 Laporan | 300 Laporan | 83% | 360 laporan | 1020 laporan | 47% |
| Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | 100% | 6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 68% |
| Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 440 Unit | 23 unit | 17 unit | 17 Unit | 100% | 17 unit | 60 unit | 14% |
| pengadaan kendaraan dinas operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 53 Unit | 2 unit | 11 unit | 11 unit | 100% | 11 unit | 26 unit | 49% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/5) | 8 | 9=(4+6+8) | 10(9/3) |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase rumah layak huni untuk korban bencana | 100% | 3% | 100% | 75% | 75% | 100% | 59% | 59% |
| | Persentase rumah layak huni untuk relokasi akibat program pemerintah daerah | 100% | 3% | 100% | 75% | 75% | 100% | 59% | 59% |
| | Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | 100% | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 69% |
| | identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kab/kota | 16 Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100% | 2 dokumen | 4 dokumen | 31% |
| | Identifikasi lahan lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | 10 Dokumen | 1 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 5 Dokumen | 50% |
| | Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
| | Sosialisasi tentang mekanisme Penggantian hak atas tanah dan bangunan | 250 Orang | - | 50 orang | 50 orang | 100% | 50 orang | 100 orang | 40% |
| | sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP | 250 Orang | - | 50 orang | 50 orang | 100% | 50 orang | 100 orang | 40% |
| | Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten /kota | 50 unit rumah | 0 Unit | 10 unit rumah | 0 Unit | 0% | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 20,00% |
| | tersedianya rumah layak huni bagi relokasi program Kab/Kota | 50 unit rumah | 0 Unit | 10 unit rumah | 0 Unit | 0% | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 20,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------------|--------|---------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|--------|
| Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 0 Unit | 50 unit rumah | 0 Unit | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 0 Unit | 0% | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 20,00% |
| Penyusunan site plan dan /atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | 18 dokumen | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 4 Dokumen | 22% |
| Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota | - | 50 Ha | - | 10 Ha | 10 Ha | 0 Ha | 0% | 10 Ha | 10 Ha | 20% |
| pembangunan rumah bagi korban bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | - | 50 Unit Rumah | - | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 0 Unit | 0% | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 20% |
| pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota | Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kab/Kota atau yang terkena relokasi program Kab/Kota yang terbangun | - | 50 Unit Rumah | - | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 0 Unit | 0% | 10 unit rumah | 10 unit rumah | 20% |
| Penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan perumahan | Persentase developer yang memperoleh izin | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
| fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang terintegrasi secara elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | - | 10 Dokumen | - | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 4 dokumen | 40% |
| koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | - | 31 Laporan | - | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 2 laporan | 6% |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh | | 126,5 Ha | | 10% | | | | 10% | | |
| Penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman | Persentase pengendalian pengembangan kawasan permukiman | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
| Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi | - | 11 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 Dokumen | 18% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|------|-----------|-----------|-----|
| koordinasi, dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | - | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 2 Laporan | 14% |
|--|--|---|-----------|------|-----------|-----------|-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7=(6/5) | 8 | 10(9/3) |
|--|--|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|
| Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh)Ha | Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh | (9,85 Ha) | 0% | 10% | 100% | 10% | |
| survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh | jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh | 8 Dokumen | - | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 25% |
| Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 13 dokumen | - | 1 dokumen | 100% | 2 dokumen | 23% |
| Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 36 laporan | - | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 67% |
| penyadaran publik pencegahan Tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | jumlah laporan pelaksanaan penyadaran publik pencegahan Tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | 25 Laporan | - | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 8% |
| Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh | (9,85 Ha) | 0% | 10% | 100% | 10% | |
| Penyusunan Rencana tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) Perumahan /pemugaran permukiman kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 13 Dokumen | 0 Dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 31% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Perbaikan rumah tidak layak huni | jumlah rumah tidak layak huni yang di perbaiki | 250 Unit Rumah | 0 Unit Rumah | 50 unit rumah | 0 Unit Rumah | 0% | 50 unit rumah | 50 unit rumah | 20% |
| Pelaksanaan pembangunan perumahan permukiman permukiman kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Ditemajakan/Dijugar | 5 Ha | 0 Ha | 1 Ha | 0 Ha | 0% | 1 Ha | 1 Ha | 20% |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase penurunan RLTH diluar kawasan kumuh | 1700 Unit | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 6% | 6% |
| Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kab/Kota | Jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni | 255 unit rumah | 0 Unit Rumah | 51 unit rumah | 0 Unit Rumah | 0% | 51 unit rumah | 51 unit rumah | 20% |
| perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang di perbaiki | jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang di perbaiki | 255 unit rumah | 0 Unit Rumah | 51 unit rumah | 0 Unit Rumah | 0% | 51 unit rumah | 51 unit rumah | 20% |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | cakupan peningkatan PSU | 100% | 25% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan | 100% | 25% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 20 dokumen | 20 Dokumen | 10% | 2 Dokumen | 4 dokumen | 40% |
| Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 13 Lokasi | - | 1700 lokasi | - | - | 2000 Lokasi | 3821 Lokasi | - |
| Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan | 5 Laporan | - | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 Laporan | 3 Laporan | 60% |
| verifikasi dan penyerahan PSU permasalahannya dari pengembangan kerja sama penyediaan atau pengelolaan PSU permukiman | Jumlah Dokumen kerjasama penyediaan atau pengelolaan PSU perumahan | 5 Dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 Laporan | 60% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|-----|-----|
| <p>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> | <p>Persentase Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</p> | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
| <p>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</p> | <p>Jumlah registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai peraturan/ketentuan</p> | 10 Dokumentasi | 0 Dokumentasi | 2 dokumentasi | 2 dokumentasi | 100% 2 Dokumentasi | 6 laporan | 60% | |
| <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</p> | <p>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</p> | 10 Laporan | 0 Dokumentasi | 2 laporan | 2 laporan | 100% 2 laporan | 6 laporan | 60% | |

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Niasa Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tjulung Jabung Barat

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | | | Proyeksi | | | | | | | Catatan |
|----|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------|------|------|------|----|--|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Jumlah Layak huni untuk korban bencana dan terdampak akibat program pemerintah daerah | | | - | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | Perbaikan Rumah Tangga Layak Huni Bagi MBR | | | 49 Unit | 150 Unit | 150 Unit | 150 Unit | 150 Unit | 150 Unit | 150 Unit | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU | | | 2 Perumahan | 2 Perumahan | 2 Perumahan | 2 Perumahan | 2 Perumahan | 2 Perumahan | 2 Perumahan | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | Capaian Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha | | | 9,85 ha | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | Jumlah registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai peraturan/bertentuan | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - | | |

2.4 Isu-isu

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan

kepemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan, sumberdaya aparatur dan elemen pendukung lainnya.

Kelembagaan perangkat Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut memuat hal – hal pokok tentang organisasi perangkat daerah.

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memeberikan pelayanan teknis dan administrasi keada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas secretariat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2. Kassubag Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan dan keuangan.

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan

- pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan Keuangan;
 - g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan penyusunan laporan asset;
 - h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3. Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program
- Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program
- a. Melakukan penyiapan Bahan peumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari Bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;

- d. Melakukan penghimpunan , pengelolaan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi, pusat secara lintas program;
 - f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja(Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
4. Bidang Perumahan
- Bidang Perumahan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitas, pendataan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan.
- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan rogram dan rencana kerja di bidang perumahan ;
 - b. Meniakan erumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi pemantauan dan evaluasi pengembangan perumahan meliputi penyediaan perumahan terkena relokasi, penyediaan rehabilitasi perumahan korban bencana menyiapkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
 - c. Penyiapan perumusankbijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan meliputi skema bantuan pembiyaan pembangunan perumahan, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layyak huni;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengendalian perumahan meliputi penertiban izin pembangunan

- pembangunan perumahan dan penertiban sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung Sekolah (SKBG); dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.
5. Seksi Pengembangan Perumahan
- Seksi pengembangan perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitas penyediaan dan rehabilitasi serta penyiapan kawasan siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba)
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk lingkup pengembangan perumahan;
 - c. Melakukan kebijakan lingkup pengembangan perumahan;
 - d. Melaksanakan Fasilitas penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi;
 - e. Melaksanakan Penyediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - f. Melaksanakan penyiapan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Kasiba dan Lisiba)
 - g. Melakukan koordinasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan perumahan;
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.
6. Seksi Pembiayaan Perumahan
- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bantuan pembiayaan dan bantuan rehabilitasi rumah dan tak layak huni lingkup pembiayaan perumahan

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pembiayaan perumahan;
 - c. Melaksanakan Kebijakan lingkup pembayaran perumahan;
 - d. Menyiapkan skema bantuan pembiayaan pembangunan perumahan;
 - e. Melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan lingkup pembiayaan perumahan; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.
7. **Pendataan dan Pengendalian Perumahan**
- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi penertibn izin dan SKBG, melkasankan pendataan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan Pengendalian Perumahan.
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencanan Kerja dan anggaran seksi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan etunjuk teknis lingkup pendataan dan pengendalian perumahan;
 - c. Menfasilitasi penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - d. Melaksanakan kegiatan Pendataan rumah tidak layak huni;
 - e. Memfasilitasi penertiban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
 - f. Menyiapkkkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas;

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengendalian perumahan; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.
8. Bidang Kawasan Permukiman
- Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, penanganan, pencegahan, pengembangan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.
- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang kawasan permukiman;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, kordinasi, pemantauandan evaluasi prasarana dan sarana utilasi umum meliputi pembangunan sarana prasarana utilasi umum, sertifikasi registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan peRancangan Akhir dan perencanaan rumah serta perencanaan uilasi umum tingkat kemampuan kecil;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi pemantauandan evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kuuh dan pencegahan perumahan perukiman kumuh;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan permukiman meliputi pengebangan kawasan permukiman dan rekomendasi izin pembangunan pengembangan kawasan Permukiman; dan
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.
9. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, sertifikat dan registrasi, koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup prasarana dan sarana utilitas umum
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup Prasarana dan sarana utilitas umum;
 - c. Melaksanakan Kebijakan Lingkup prasarana dan sarana utilitas umum;
 - d. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum Perumahan;
 - e. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan Akhir dan perencanaan rumah serta persencanaan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup tugasnya;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.
10. Seksi Penanganan Kawasan permukiman Kumuh
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh;
 - c. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - d. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

- e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.
11. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan permukiman;
 - c. Melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Permukiman;
 - d. Memberikan rekomendasi isin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman;
 - e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang meliputi;

Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Ketatausahaan serta tugas jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- b. penyelenggaraan urusan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- c. perencanaan program di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak berbeda.
2. Rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat diRancangan Akhir RKPD atau program dankegiatan cocok beserta besarannya

Tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 Kantor Kecamatan Pengabuan dituangkan pada Tabel T-C.31;

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kab Tanjab Barat.

Berikut adalah Program dan kegiatan Dinas PERAKIM Kab. Tanjab Barat berdasarkan usulan dari masyarakat atau pemangku kepentingan pada tahun 2023 yang tertuang dalam Tabel T-C.32

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERAKIM) Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Kebijakan Bidang Perumahan

1. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
2. Penyediaan dan penyediaan rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kab/kota
3. Tersedianya Perumahan yang terfasilitasi PSU

b. Kebijakan Bidang Kawasan Permukiman

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman di kawasan permukiman Kumuh
2. Meningkatnya cakupan pelayanan Prasarana Sarana dan Utilitas di Kawasan permukiman Kumuh
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan harus disusun dengan baik guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yaitu

“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten Perumahan dan Kawasan Permukiman, menetapkan Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni, Berkualitas dan Berkelanjutan

Adapun Misi dari penjabaran Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai Berikut:

1. Mewujudkan Perumahan yang Terjangkau dan Layak Huni
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang layak Huni dan Produktif melalui Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang Terpadu, Handal dan Berkelanjutan

Sedangkan Program-program Prioritas untuk menunjang daripada Misi tersebut di atas anantara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
2. Program Peningkatan Kualitas Rumah
3. Program Kota Tanpa Kumuh

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No | Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Bidang | Kondisi Awal 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|--|--|---|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 1 | Tersedianya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni | Tersedianya Perumahan Layak Huni | Persentase Rumah layak Huni dalam lingkup perumahan swadaya | Bidang Perumahan | 9,11% | 9,61% | 9,61% | 9,61% | 9,61% | 9,61% |
| 2 | | Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan Permukiman | Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU | Bidang Perumahan | 60% | 16,67% | 20% | 25% | 33,33% | 100% |
| | | | Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10Ha | Bidang Permukiman | 9,85 Ha | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | | Meningkatnya Pelayanan, Serifikasi, Kalifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase registrasi dan sertifikasi yang dibitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan | Bidang Perumahan | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 mempunyai beberapa program mengacu pada RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 dan juga RPJMD Tahun 2021-2026 diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan pelayanan Sertifikasi, bdan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk Menunjang program-program diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa Kegiatan untuk Tahun 2023 yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
9. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
10. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota
11. Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan perumahan
12. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
13. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh)Ha
14. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh)Ha
15. Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota
16. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
17. Setifikasi dan registrasi bagi orang atau badan bhukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil

Untuk Menunjang Sub Kegiatan diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa Sub Kegiatan untuk Tahun 2023 yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
15. Penyediaan Jasa Surat menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

22. Identifikasi Perumahan di Lokasi rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/kota
23. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Relokasi Perumahan
24. Sosialisasi tentang mekanisme pekerangan hak atas tanah dan bangunan
25. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP
26. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana
27. Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
28. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
29. Pembangunan rumah bagi korban bencana
30. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban atau relokasi program kabupaten/kota
31. Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik
32. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
33. Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
34. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
35. Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh

36. penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
37. Pembentukan/pembinaan kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman kumuh
38. Penyadaraan publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
39. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremejaan/pemugaran Permukiman Kumuh
40. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
41. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
42. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
43. Perencanaan Penyediaan PSU
44. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
45. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum Perumahan
46. Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU Permukiman
47. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil

Adapun pengelompokan program dan kegiatan yang menunjang Tujuan, sasaran dan indicator kinerja dinas perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program | Kegiatan |
|----|--|---|--|---|---|
| 1 | Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni | Tersedianya Perumahan Layak Huni | Persentase rumah layak huni dalam lingup perumahan swadaya | Program Pengembangan Permukiman | Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota |
| | | | | | Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota |
| | | | | | Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota |
| | | | | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha |
| 2 | | Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan Permukiman | Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan |
| | | | Persentase Penurunan Kawasan | Program Kawasan | Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha | Permukiman | kawasan permukiman |
| | | | | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha |
| | | | | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha |
| 3 | | Meningkatnya Pelayanan, Serifikasi, Kalifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase registrasi dan Serifikasi yang diterbitkan sesuai Peraturan/Ketentuan | Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman | Kegiatan Sertifikasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil |

| No | Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Bidang | Kondisi Awal 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Keterangan |
|----|--|---|--|------------------|-------------------|--------|-------|-------|--------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni | Tersedianya Perumahan Layak Huni | 1. persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya | Bidang Perumahan | 9,11% | 9,61% | 9,61% | 9,61% | 9,61% | 9,61% | $\frac{\text{Rumah Layak Huni Tertangani}}{\text{Total Rumah Tidak Layak Huni}} \times 100\%$ |
| | | Meningkatnya Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman | 2. Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU | Bidang Perumahan | 2 Perumahan | 16,67% | 20% | 25% | 33,33% | 100% | $\frac{\text{Perumahan yang Terfasilitasi PSU}}{\text{Total Perumahan yang tersedia}} \times 100\%$ |

Pada tabel di atas, Target yang akan dicapai pada Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijabarkan di bawah ini.

1. Target indikator Kinerja pada Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah merupakan target yang bersifat urgensi artinya target akan tercapai apabila terdapat Korban bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah dan Relokasi rumah akibat dari program pemerintah.
2. Target Indikator Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR merupakan indikator dalam pencapaian rumah layak huni bagi masyarakat. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan 150 unit rumah pertahunnya dengan harapan jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa teratasi, baik dari Dana APBD, Dana Provinsi ataupun Dana Pusat.
3. Target Indikator Kinerja Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU merupakan penunjang dari pelayanan dasar masyarakat. Target yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat pertahunnya 2 Perumahan yang akan terfasilitasi PSU setiap Tahunnya, artinya selama 5 tahun mendatang mencapai 10 Perumahan yang akan terfasilitasi PSU. Mengingat keterbasan anggaran

dan cakupan perumahan yang cukup luas, dinas akan melaksanakan pelayanan dasar tersebut secara bertahap atau periodik.

4. Target Indikator Kinerja capaian pengurangan Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha setiap tahunnya di targetkan akan berkurang 10% pertahunnya, sehingga pada lima tahun kedepan dinas menargetkan 50% dari kondisi awal sebesar 9,85 ha, artinya pengurangan sebesar 4,925 ha yang ditargetkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Target indikator kinerja Jumlah Registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai peraturan/ketentuan dimaksudkan untuk para developer yang akan melakukan pengembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dari target ini adalah agar Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk pengembang, sehingga dalam pelaksanaan nantinya pengembang dapat mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan pada Tabel TC.33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah di tuangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dikelompokkan sebagai berikut : DPA 2023

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | RENCANA TAHUN 2023 | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | LOKASI | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12 Bulan | 15.327.323.599 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B | | 100% | 69.000.000 | APDB |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 12 Dokumen | 33.000.000 | APDB |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 7 Laporan | 36.000.000 | APDB |
| Administrasi keuangan perangkat daerah | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD | | 100% | 3.409.283.599 | APDB |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 25 Orang/Bulan | 2.924.483.599 | APDB |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 25 Dokumen | 484.800.000 | APDB |

| | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|---------------|------|
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Perkim | 100% | 172.600.000 | APBD |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 160 Paket | 92.600.000 | APDB |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 16 Orang | 80.000.000 | APDB |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran | Dinas Perkim | 100% | 1.089.708.000 | APDB |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 6.378.000 | APDB |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--------------------|-------------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 94.825.000 | APDB |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 32.550.000 | APDB |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | | 12 paket | 42.000.000 | APDB |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 12 Dokumen | 14.000.0000 | APDB |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 360 Laporan | 899.955.000 | APDB |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | Dinas Perkim | 100% | 670.573.000 | APBD |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 3 unit filling cabinet, 4 buah lemari arsip, 6 buah meja meubeleu r, 1 biro, 6 kursi pejabat, 50 kursi rapat (69 Unit) | 419.535.000 | APBD |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | 2 unit Motor | 251.038.000 | APBD |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | Dinas Perkim | 100% | 9.227.799.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 500 Laporan | 6.600.000 | APBD |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|---------------|------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 7.995.200.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 Laporan | 1.225.999.000 | APBD |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara | Dinas Perkim | 100% | 688.360.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 9 Unit | 76.950.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 3 Unit | 201.710.000 | APBD |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 60 Unit | 40.870.000 | APBD |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 1 Unit | 368.830.000 | APBD |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana | Dinas Perkim | 100% | 2.926.260.000 | APBD |
| | persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah | Dinas Perkim | 100% | | |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dinas Perkim | 100% | 700.000.000 | APBD |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 13 Kecamatan | 5 Dokumen | 500.000.000 | APBD |
| Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 200.000.000 | APBD |
| Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase KK yang mengikuti sosialisasi | Dinas Perkim | 100 | 152.670.000 | APBD |
| Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | 13 Kecamatan | 50 Orang | 74.460.000 | APBD |
| Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | 13 Kecamatan | 50 Orang | 78.210.000 | APBD |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Tersedianya Rumah Layak Huni bagi korban Bencana atau relokasi program kabupaten | Dinas Perkim | 20 Unit | 2.073.590.000 | APBD |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 13 Kecamatan | 20 Unit | 437.190.000 | APBD |
| Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 300.000.000 | APBD |
| Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 13 Kecamatan | 10 Unit Rumah | 1.336.400.000 | APBD |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh | Dinas Perkim | 10% | 7.754.909.800 | APBD |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------|----------------------|-------------|
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Persentase pengendalian pengembangan kawasan permukiman | Dinas Perkim | 100% | 178.649.800 | APBD |
| Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi | 13 Kecamatan | 1 Dokumen | 178.649.800 | APBD |
| Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha | Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh | Dinas Perkim | 100% | 1.007.360.000 | |
| Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Permukiman kumuh | Jumlah Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 750.000.000 | APBD |
| Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 13 Kecamatan | 6 Laporan | 125.680.000 | APBD |
| Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 13 Kecamatan | 6 Laporan | 131.680.000 | APBD |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh | Dinas Perkim | 100 | 6.568.900.000 | |
| Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 200.000.000 | APBD |
| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 13 Kecamatan | 50 Unit | 1.325.000.000 | APBD |
| Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | 13 Kecamatan | 1 Ha | 5.043.900.000 | APBD |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Penurunan RTLH di luar Kawasan Kumuh | Dinas Perkim | 3% | 1.649.380.000 | |
| Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak huni | Dinas Perkim | 51 unit | 1.649.380.000 | |
| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 13 kecamatan | 51 unit rumah | 1.649.380.000 | APBD |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU) | cakupan peningkatan PSU | Dinas Perkim | 100% | 85.511.250.000 | |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan | Dinas Perkim | 100% | 85.511.250.000 | |
| Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 13 Kecamatan | 2 Dokumen | 1.000.000.000 | |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 13 Kecamatan | 13 Lokasi | 84.461.250.000 | |
| Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 13 Kecamatan | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Peningkatan Pelayanan, Serifikasi, Kalifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perkim | 100% | 59.999.900 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|-----------------|------|
| Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | Jumlah registrasi dan Sertifikasi yang diterbitkan sesuai Peraturan/Ketentuan | Dinas Perkim | 2 Dokumen | 59.999.900 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 13 kecamatan | 2 Laporan | 59.999.900 | APBD |
| | | | | | |
| | | | | 113.229.123.299 | |

BAB V
PENUTUP

RENCANA KERJA (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026 dan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2023.

Dengan tersusunnya RENCANA KERJA (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2023.

Kuala Tungkal,

2023

Pit. KEPALA DINAS
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAFRUN, ST

Pembina

NIP. 19821126 201001 1 015